ABSTRAK

Sejak puluhan tahun yang lalu, Bangladesh berhadapan dengan permasalahan arus masuk pengungsi Rohingya. Awalnya, Bangladesh menerima pengungsi Rohingya dengan baik. Namun seiring bertambahnya pengungsi Rohingya yang masuk, penolakan terus didengungkan oleh Pemerintah Bangladesh. Pada tahun 2013, Bangladesh menyetujui kebijakan "Strategy Paper on Addressing the Issue of Myanmar Refugees and Undocumented Myanmar Nationals in Bangladesh" yang salah satunya berisikan mengenai pelarangan masuk dan mengawasi bagi Rohingya yang tidak berdokumentasi. Namun, pada tahun 2016 dan khususnya 2017, justru Bangladesh menerima banyak pengungsi Rohingya hingga saat ini. Pertanyaan kemudian muncul, dari adanya fakta penerimaan pengungsi yang begitu besar dimana sebelumnya terdapat penolakan yang didengungkan oleh Pemerintah Bangladesh. Teori migrasi internasional serta faktor yang mempengaruhi kebijakan negara dalam menghadapi gelombang pengungsi digunakan dalam menjawab pertanyaan penelitian ini. Teknik penelitian kualitatif dan bersifat eksplanatif merupakan metode dalam penelitian. Operasionalisasi konsep ialah rezim pengungsi internasional serta tekanannya, kebijakan pengungsi, dan komitmen donor. Penelitian ini kemudian menemukan setidaknya tiga alasan Bangladesh tetap menerima pengungsi Rohingya. Pertama, adanya tekanan dari rezim pengungsi internasional terhadap kebijakan Bangladesh mengenai Rohingya. Kedua, adanya komitmen donor atau bantuan dari rezim pengungsi internasional memiliki arti penting dari perubahan sikap Bangladesh dalam menerima pengungsi Rohingya. Ketiga, tekanan yang diiringi bantuan dari rezim pengungsi internasional memberikan keuntungan tersendiri bagi Pemerintah Bangladesh maupun penduduk lokal terdampak. Dengan adanya temuan tersebut, penelitian ini menyimpulkan bahwa tekanan dan bantuan rezim pengungsi internasional memberikan pengaruh tersendiri bagi Bangladesh untuk segera membuka pintu perbatasannya, menerima serta melayani pengungsi Rohingya dengan baik.

Kata-kata kunci: Rohingya, rezim pengungsi internasional, tekanan rezim pengungsi internasional, bantuan rezim pengungsi internasional, kebijakan pengungsi, Bangladesh.